

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**JURNAL**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Mega Yunita Prassiwi**  
**NIM : 2021522544**  
**Progdi : Akuntansi**

**UNIVERSITAS DHARMA AUB**  
**SURAKARTA**  
**2025**

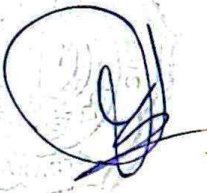
## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Nama : Mega Yunita Prassiwi  
NIM : 2021522544  
Jurusan/Progdi : Akuntansi  
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  
Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah  
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Nama Pembimbing : Ridwan Wahyudi, SE., MM.

Surakarta, 27 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



A circular official stamp of the institution is partially visible behind the signature of the Program Study Head.

Mulyadi, SE., MM., MH., AK., CA  
NIDN: 0610096501

Dosen Pembimbing



Ridwan Wahyudi, SE., MM.  
NIDN: 0616119401

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

***THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE, FISCAL BALANCE TRANSFER, CAPITAL EXPENDITURE AND GOVERNMENT SIZE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT***

**Mega Yunita Prassiwi<sup>1</sup>, Ridwan Wahyudi<sup>2</sup>**

Program Studi S1 Akuntansi

Email : [megayunita002@gmail.com](mailto:megayunita002@gmail.com)<sup>1</sup>, [ridwanwahyudi534@gmail.com](mailto:ridwanwahyudi534@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya pada tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah satu kota dan enam kabupaten di Solo Raya. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 sampel, yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 4,7% sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya *Adjusted R-Square* sebesar 0,047 sedangkan sisanya 95,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of original local government revenue, fiscal balance transfer, capital expenditure, and government size on the financial performance of local governments in Solo Raya from 2018-2023. This research uses a quantitative approach. The population in this study is one city and six districts in Solo Raya. The sampling technique applied is saturation sampling, where all population members are included as samples. The total sample in this study consists of 7 local governments, including Surakarta City, Karanganyar Regency, Sukoharjo Regency, Klaten Regency, Sragen Regency, Boyolali Regency, and Wonogiri Regency. The data analysis tool used is multiple linear regression. The results show that the original local government revenue variable has a significant effect on the financial performance of local government. Meanwhile, the fiscal balance transfer, capital expenditure, and government size variables do not have a significant effect on the financial performance of local government. The ability of original local government revenue, fiscal balance transfer, capital expenditure, and government size to explain financial performance of local government is 4.7%, as indicated by an Adjusted R-Square value of 0.047, while the remaining 95.3% is explained by other variables outside this study.*

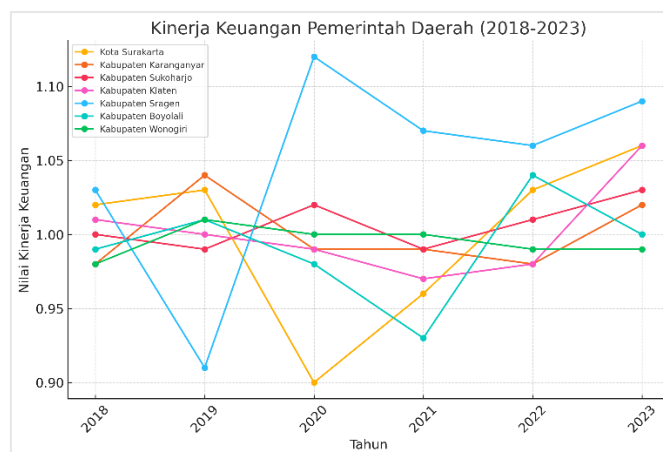
**Keywords:** Financial Performance Of Local Government, Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Transfer, Capital Expenditure, Government Size.

**PENDAHULUAN**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan, mengalokasikan belanja, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, serta ukuran pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik akan memungkinkan

daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, serta meningkatkan layanan publik yang lebih berkualitas.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Keuangan daerah yang sehat memungkinkan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara optimal. Solo Raya, yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah antara lain Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Pemerintah daerah di Solo Raya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ini yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah terutama dari pajak dan retribusi, sehingga mempengaruhi stabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah (Fadila, 2024). Hal tersebut semakin diperparah saat pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 tersebut berdampak besar pada kinerja keuangan di Daerah Solo Raya (Syamsul et al., 2022). Konsekuensi dari tantangan tersebut terlihat dalam tren efisiensi keuangan pada berbagai daerah di Solo Raya.



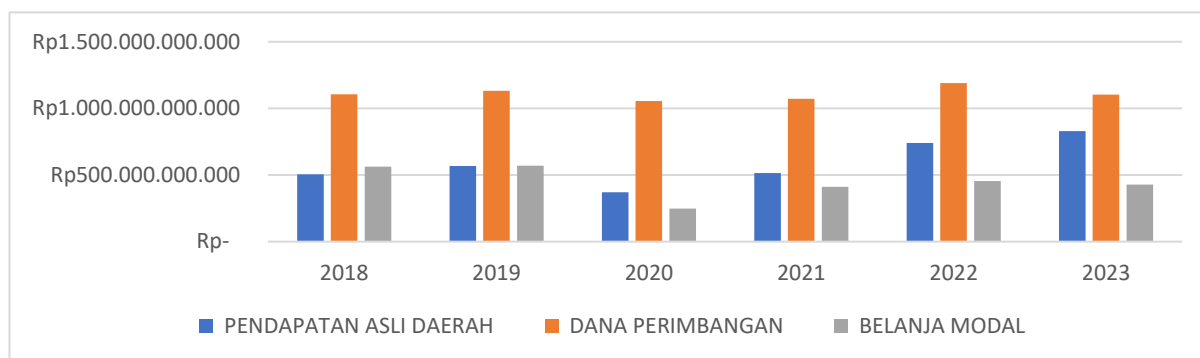
Gambar 1. Tren Efisiensi Keuangan Daerah di Solo Raya tahun 2018-2023

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada 2020, Kabupaten Sragen mencatat peningkatan PAD dari Rp368,3 miliar menjadi Rp394,4 miliar pada 2019, namun belanja daerah melonjak, menaikkan rasio efisiensi dari 91% menjadi 112%. Kabupaten Sukoharjo juga mengalami kenaikan PAD dari Rp458,7 miliar menjadi Rp469,5 miliar, tetapi rasio efisiensi naik ke 102%, mencerminkan lonjakan belanja daerah. Kabupaten Karanganyar menunjukkan perbaikan efisiensi, dengan rasio pada 2019 sebesar 104% turun menjadi 99% pada 2020, menandakan pengelolaan keuangan yang lebih terkendali. Setelah 2020, rasio efisiensi tetap stabil di kisaran 98%–102%, dengan PAD meningkat menjadi Rp441,8 miliar pada 2023. Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi efisiensi, turun ke 98% pada 2020 dengan PAD Rp451,5 miliar, lalu naik ke 104% pada 2022. Sementara itu, Kabupaten Klaten dan Wonogiri menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan dana perimbangan, dengan rasio efisiensi masing-masing 99% dan 100% pada 2020.

Di tengah dinamika efisiensi keuangan yang terjadi di Solo Raya, Kota Surakarta sebagai pusat ekonomi mengalami tren efisiensi keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan signifikan pada PAD, terutama dari sektor pariwisata dan pajak hotel. Pendapatan pajak hotel dan pajak restoran turun drastis dari Rp96,7 miliar pada 2019, menjadi hanya Rp13,9 miliar untuk pajak hotel dan Rp27,6 miliar untuk pajak restoran hingga Oktober 2020 (Ricky, 2020). Selain itu, realisasi belanja modal yang tidak optimal menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengalokasian anggaran daerah (Hapsari et al., 2022).

Pada periode pasca pandemi, meskipun terjadi peningkatan PAD Kota Surakarta dari Rp647,4 miliar pada 2022 menjadi Rp687,3 miliar pada 2023, target realisasi PAD tahun 2022 belum tercapai, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah masih dalam tahap pemulihan (Nugraheni, 2024). Permasalahan ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, khususnya dalam memaksimalkan PAD, meningkatkan efisiensi belanja modal, serta mengoptimalkan ukuran pemerintah daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2018-2023

Sumber : ppid.surakarta.go.id

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan menambah literatur dalam bidang ekonomi dan akuntansi sektor publik serta memperkuat teori keagenan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan fiskal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) memperkerjakan pihak lain (agen) untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan atas namanya. Menurut Purba (2023), teori ini menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal, di mana prinsipal membutuhkan informasi terkait pengelolaan dana yang diinvestasikan.

Dalam penelitian ini, masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah sebagai agen. Permasalahan utama dalam teori keagenan adalah asimetri informasi, di mana pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi dibandingkan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola APBD dan menyusun laporan keuangan, namun ketidakkonsistenan pelaporan dapat menyebabkan manipulasi data dan kecurangan. Selain itu, pemerintah pusat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Namun, asimetri informasi dapat menghambat pengawasan dan pengambilan keputusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu dinilai secara berkala oleh masyarakat dan pemerintah pusat agar pengelolaan keuangan tetap transparan dan sesuai peraturan (Nauw & Riharjo, 2021).

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mencapai otonomi (Maulina et al., 2021). Tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan rasio pertumbuhan (Halim, 2008). Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rasio efisiensi, di mana rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

| Kriteria Efisiensi | Persentase Efisiensi |
|--------------------|----------------------|
| >100%              | Tidak Efisien        |
| 100%               | Efisiensi Berimbang  |
| <100%              | Efisien              |

Sumber : (Mahsun, 2012)

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi PAD dalam APBD, semakin rendah ketergantungan terhadap transfer pusat, yang berdampak positif terhadap kinerja makroekonomi dan efisiensi keuangan daerah (Digdowiseiso et al., 2022).

### **Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dengan sistem yang adil dan transparan (Nauw & Riharjo, 2021). Semakin besar dana perimbangan, semakin baik kinerja keuangan daerah (Mulyani & Wibowo, 2017).

### **Belanja Modal**

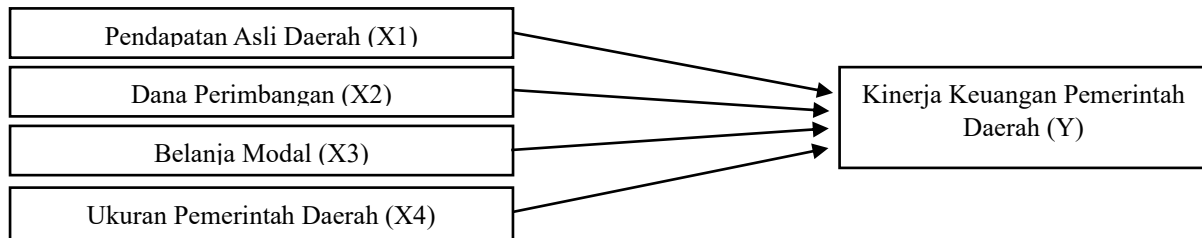
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja modal meliputi tanah, peralatan, gedung, jalan, dan aset lainnya. Peningkatan belanja modal menunjukkan produktivitas pemerintah daerah dalam pembangunan, yang berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah (Digdowiseiso et al., 2022).

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah berkaitan dengan besar atau kecilnya suatu daerah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Daerah yang lebih besar memiliki kemudahan dalam menjalankan operasionalnya dibandingkan daerah yang lebih kecil (Haque & Rohman, 2022a). Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah, diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin optimal (Mulyani & Wibowo, 2017).

## **KERANGKA PENELITIAN**

Berikut adalah kerangka penelitian yang dibangun.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Sumber : (Mulyani & Wibowo, 2017), (Maulina et al., 2021), dan (Haque & Rohman, 2022)

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. PAD yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (Prastiwi & Aji, 2020). Dalam penelitian penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), Maulina et al. (2021), dan Nauw & Riharjo (2021) diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

### **Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan serta mengurangi ketimpangan sumber pembiayaan antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dana perimbangan juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja

keuangan pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022). Dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), dan Maulina et al. (2021) diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>2</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

### **Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peningkatan belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan ini, realisasi PAD akan turut bertambah secara tidak langsung. Pembangunan infrastruktur daerah, seperti fasilitas umum, merupakan salah satu bentuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan pendapatan daerah, serta kinerja keuangan daerah akan menjadi lebih baik (Sari & Mustanda, 2019). Dalam penelitian Andirfa et al. (2016), Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022a) diperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>3</sub> : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

### **Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan melalui total aset daerah, merupakan salah satu indikator untuk menilai kemudahan operasional di tingkat daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin mudah pula pelaksanaan kegiatan operasional serta jalannya roda pemerintahan. Selain mempermudah operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar juga memfasilitasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi PAD dan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Dalam penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), dan Haque & Rohman (2022a) diperoleh hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H<sub>4</sub> : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Solo Raya, yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri. Obyek penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Solo Raya tahun 2018-2023. Populasi penelitian mencakup seluruh daerah di Solo Raya. Teknik *sampling* jenuh digunakan untuk menentukan sampel, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Suriani et al., 2023). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Solo Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Pemerintah Daerah Solo Raya tahun 2018-2023.

### **Variabel Penelitian**

Tabel 2. Variabel dan Pengukuran

| <b>Variabel</b>                    | <b>Pengukuran</b>  |
|------------------------------------|--|
| Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Total Realisasi Penerimaan}}{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}$   |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)       | PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah   |
| Dana Perimbangan                   | DP = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus   |
| Belanja Modal                      | BM = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan + Belanja Modal Aset Tetap Lainnya + Belanja Modal Aset Lainnya |
| Ukuran Pemerintah Daerah           | UPD = Ln (Total Aset)  |

Keterangan:

PD = Pajak Daerah

DP = Dana Perimbangan

BM = Belanja Modal

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah  
 LN = Logaritma Natural

**Metode Analisis**

Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien dari variabel independen
- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah
- $X_2$  = Dana Perimbangan
- $X_3$  = Belanja Modal
- $X_4$  = Ukuran Pemerintah Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\varepsilon$  = *error terms*

**HASIL PENELITIAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

|            | N  | Minimum           | Maximum           | Mean              | Std. Deviation  |
|------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PAD        | 42 | 241.300.072.883   | 687.326.602.700   | 420.691.151.489   | 103.402.436.471 |
| DP         | 42 | 1.045.123.446.172 | 1.695.716.358.118 | 1.368.503.341.347 | 176.575.809.618 |
| BM         | 42 | 148.559.342.370   | 567.084.220.580   | 341.597.301.160   | 112.935.583.901 |
| UPD        | 42 | 28,76             | 30,25             | 29,2179           | ,41940          |
| KKD        | 42 | ,90               | 1,12              | 1,0060            | ,04231          |
| (listwise) | 42 |                   |                   |                   |                 |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

**Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4. Uji Normalitas**

| Unstandardized Residual |      |
|-------------------------|------|
| N                       | 42   |
| Test Statistic          | ,633 |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | ,818 |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (0,818 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

| Model      | Collinearity Statistics |       |
|------------|-------------------------|-------|
|            | Tolerance               | VIF   |
| (Constant) |                         |       |
| PAD        | ,300                    | 3,335 |
| DP         | ,341                    | 2,936 |
| BM         | ,931                    | 1,075 |
| UPD        | ,318                    | 3,144 |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

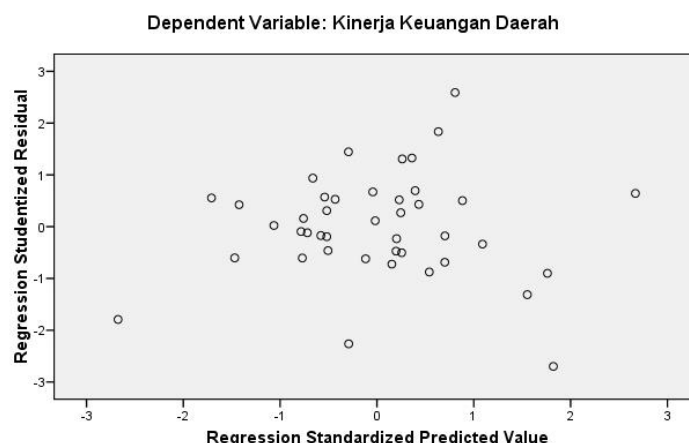
Pada tabel 5 dapat diketahui dari semua variabel hasil perhitungan, nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,374 <sup>a</sup> | ,140     | ,047              | ,04131                     | 2,117         |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tabel 6 dapat diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,117. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau setara dengan 0,05. Total sampel pada penelitian ini sebanyak 42 data dan menggunakan 4 variabel independen (n=42, k=4), dengan data tersebut maka batas nilai dL sebesar 1,3064 dan nilai dU sebesar 1,7202 sehingga 4-dU yaitu sebesar 2,2798. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW terletak di  $1,7202 < 2,117 < 2,2798$  ( $dU < d < 4-dU$ ) maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.



**Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Hasil pengujian statistik gambar 2 menunjukkan hasil heteroskedastisitas dengan menggunakan pola gambar Scatterplot terlihat titik-titik telah menyebar, tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant) | 2,340                       | ,810       |                           | 2,890  | ,006 |
| PAD        | 2,360                       | ,000       | ,577                      | 2,071  | ,045 |
| DP         | 2,511                       | ,000       | ,105                      | ,401   | ,691 |
| BM         | 5,333                       | ,000       | ,142                      | ,901   | ,374 |
| UPD        | -,051                       | ,027       | -,504                     | -1,864 | ,070 |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 2,340 + 2,360X_1 + 2,511X_2 + 5,333X_3 - 0,051X_4$$

Dengan demikian, hasil interpretasi persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

1.  $\alpha = 2,340$ , artinya jika variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah dianggap sama dengan nol maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan sebesar nilai konstanta.

2.  $\beta_1 = 2,360$ , artinya hasil ini menunjukkan hubungan positif antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.  $\beta_2 = 2,511$ , artinya hasil ini menunjukkan hubungan positif antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.  $\beta_3 = 5,333$ , artinya hasil ini menunjukkan hubungan positif antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.  $\beta_4 = -0,051$ , artinya hasil ini menunjukkan hubungan negatif antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 8. Uji t**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant) | 2,340                       | ,810       |                           | 2,890  | ,006 |
| PAD        | 2,360                       | ,000       | ,577                      | 2,071  | ,045 |
| DP         | 2,511                       | ,000       | ,105                      | ,401   | ,691 |
| BM         | 5,333                       | ,000       | ,142                      | ,901   | ,374 |
| UPD        | -,051                       | ,027       | -,504                     | -1,864 | ,070 |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tabel 8 hasil uji t menunjukkan pengaruh variabel terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (t hitung = 2,071;  $p = 0,045 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
2. Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (t hitung = 0,401;  $p = 0,691 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.
3. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (t hitung = 0,901;  $p = 0,374 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.
4. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (t hitung = -1,864;  $p = 0,070 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak.

**Tabel 9. Uji F**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | ,010           | 4  | ,003        | 1,505 | ,221 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | ,063           | 37 | ,002        |       |                   |
|       | Total      | ,073           | 41 |             |       |                   |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tabel 9 hasil uji F diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,221. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,221 > 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM), Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 10. Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,374 <sup>a</sup> | ,140     | ,047              | ,04131                     |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,047 dapat diartikan kemampuan variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM), Ukuran

Pemerintah Daerah (UPD) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah hanya sebesar 4,7%. Sedangkan sisanya sebesar 95,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Tabel 8, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,071 dengan nilai probabilitas sebesar 0,045. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh mendukung  $H_1$  yang telah dirumuskan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari kegiatan pemerintah daerah diotonominya dan sangat penting guna menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan daerah. Nilai PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya baik, serta mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pemerintah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), Maulina et al. (2021), dan Nauw & Riharjo (2021) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan pendapatan yang berhasil diperoleh oleh daerah tersebut. Sesuai dengan teori keagenan yaitu masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dapat mengelola seluruh pendapatan di daerahnya sendiri, yang berguna untuk membiayai seluruh kebutuhan daerahnya sendiri sesuai prinsip otonomi. (Anisa, 2020). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Andirfa et al. (2016) dan Haque & Rohman (2022) yang menyebutkan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Tabel 8, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 0,401 dengan nilai probabilitas sebesar 0,691. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh tidak mendukung  $H_2$  yang telah dirumuskan yaitu dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian Andirfa et al. (2016), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022) yaitu Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sering kali digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan dengan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, baik daerah dengan potensi ekonomi tinggi maupun daerah yang kurang berkembang menerima dana dalam jumlah yang relatif sama, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Anisa (2020), Prastiwi & Aji (2020), dan Maulina et al. (2021) yang menyebutkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Tabel 8, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 0,901 dengan nilai probabilitas sebesar 0,374. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh tidak mendukung  $H_3$  yang telah dirumuskan yaitu belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian Prastiwi & Aji (2020) dan Maulina et al. (2021) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja modal belum secara optimal memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi adalah kurangnya efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, keterlambatan dalam realisasi belanja modal, serta rendahnya kualitas pengelolaan aset yang telah dibangun. Dengan demikian, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi belanja modal lebih difokuskan pada proyek yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Andirfa et al. (2016), Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), Nauw & Riharjo (2021), dan Haque & Rohman (2022) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Tabel 8, nilai t hitung yang diperoleh sebesar -1,864 dengan nilai probabilitas sebesar 0,070. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh tidak mendukung  $H_4$  yang telah dirumuskan yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Solo Raya.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Maulina et al. (2021) yang menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Situasi ini mendorong dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan guna meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu mengelola keuangan secara terampil dan profesional. Berdasarkan hasil penelitian, peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ukuran pemerintah yang lebih besar justru mengalami inefisiensi akibat rendahnya produktivitas dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya ukuran pemerintah, tetapi juga pada kualitas tata kelola, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mulyani & Wibowo (2017), Sari & Mustanda (2019), dan Haque & Rohman (2022) yang menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.
4. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Solo Raya.

## **KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian hanya berfokus pada daerah di Solo Raya, sehingga hasilnya lebih relevan untuk wilayah tersebut.
2. Penelitian hanya menggunakan empat variabel independen (PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah), sehingga tidak mencakup faktor lain yang mungkin memengaruhi kinerja keuangan daerah.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Daerah
  - a. Meningkatkan efisiensi pemungutan PAD, mendorong inovasi sumber pendapatan, dan memastikan kepatuhan pajak.
  - b. Mengevaluasi pengelolaan dana perimbangan agar berkontribusi pada kinerja keuangan daerah.
  - c. Mengalokasikan belanja modal secara efektif untuk proyek prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
  - d. Memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal agar tidak menjadi beban keuangan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain untuk membandingkan pola hubungan antar daerah.
  - b. Menambahkan variabel independen lain yang relevan untuk analisis lebih komprehensif.
  - c. Mengembangkan metode penelitian, seperti penggunaan data panel atau variabel moderasi, untuk mengeksplorasi hubungan kausal yang lebih mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.

- Anisa, B. C. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dana perimbangan dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. *STIE Perbanas*, 1–15.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580.
- Fadila, S. N. (2024, November). Kemenkeu ungkap sejumlah tantangan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. *Kontan*. [https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-ungkap-sejumlah-tantangan-dalam-pemungutan-pajak-daerah-retribusi-daerah#google\\_vignette](https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-ungkap-sejumlah-tantangan-dalam-pemungutan-pajak-daerah-retribusi-daerah#google_vignette)
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ketiga). Salemba Empat.
- Hapsari, M., Winarsih, E., & Prabawa, S. T. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran pada pemda Kota Surakarta di era pandemi covid-19. *Edunomika*, 6(2), 1–11.
- Haque, K. S., & Rohman, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015). *KOMPARTEMEN*, 15(1), 57–66.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Nugraheni, A. I. (2024). *Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2023* (C. Fitriani, Ed.). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, JDIH BPK 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71, JDIH BPK 1 (2010).
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group. <https://www.researchgate.net/publication/369793571>
- Ricky, M. (2020, October 23). Pemkot Solo Kehilangan 50% Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Gara-Gara Pandemi. *Solopos*, 1–4. <https://solopos.espos.id/pemkot-solo-kehilangan-50-pendapatan-pajak-hotel-dan-restoran-gara-gara-pandemi-1087940>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759–4787. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis pandemi covid-19: Dampaknya pada pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi. *Keunis*, 10(2), 1–0.
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33, JDIH BPK 1 (2004).